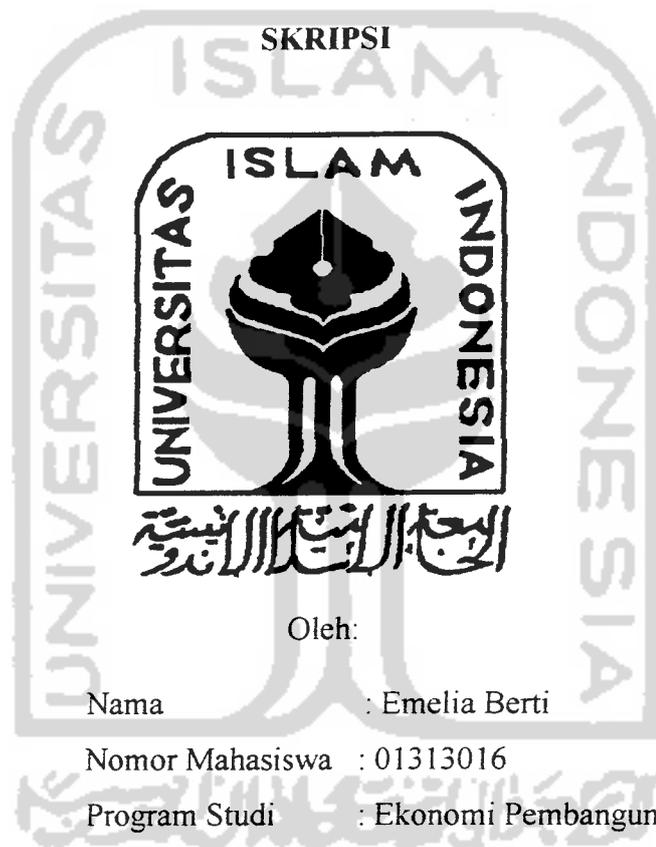


**“ MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN  
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
PERIODE 2000-2004  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**



**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**“ MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN  
DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
PERIODE 2000-2004  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**



**SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata I  
Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Emelia Berti  
Nomor Mahasiswa : 01313016  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
YOGYAKARTA  
2006**

## **PERYATAAN BEBAS PLAGARISME**

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusun skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, Juli 2006

Penulis,

(Emelia Berti)

**“ MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN  
DALAM Mendukung PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
PERIODE 2000-2004  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**



**Oleh:**

**Nama : Emelia Berti  
Nomor Mahasiswa : 01313016  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**Yogyakarta, 8 April 2006  
Telah disetujui dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Ferianto', written over a horizontal line.

**Drs. Nur Ferianto, M.Si**

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**“MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM  
MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
PERIODE 2000 – 2004  
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**

**Disusun Oleh: EMELIA BERTI  
Nomor Mahasiswa: 01313016**

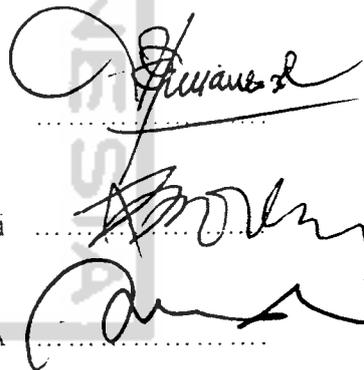
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada tanggal : 18 April 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Nur Ferianto, M.Si

Penguji I : Dra. Indah Susantun, M.Si

Penguji II : Drs. Sahabudin Sidiq, MA



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono Muhammad, MA

## *HALAMAMN MOTO*

*Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sepadan*

*dengan kemampuannya...*



*(AL Baqarah : 286)*

## *Halaman Persembahan*

*Dengan mengucapkan piji syukur Kepada Allah SWT,  
Kupersembahkan skripsi ini buat mereka yang aku cintai dan aku*

*Sayangi..*

*Papa dan mamaku, THAMRIN dan IDA tercinta. Terima kasih atas segala  
cinta,  
kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan dan kesabaran serta doa yang  
tulus. Papa dan mama adalah kebanggaan dan motivasi melia untuk terus maju.*

*Kakak dan adik-adikku, CANDRA dan DEKI, DITA yang aku sayangi.  
Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungn, pengertian dan  
perhatian kalian. Semoga kita bias mewujudkan apa yang menjadi  
impian papa dan mama.*

## KATA PENGANTAR

**Assalamu alaikum Wr.Wb.**

Alhamdulillah Robbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di Kabupaten Lampung Timur”.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesrjanaan pada program strata I jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000-2004.

Salah satu bagian yang tidak terlupakan dan paling menggembirakan dalam penulisan ini adalah kesempatan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Suwarsono Muhammad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bpk. Nur Ferianto, Drs., MS, SI, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, khususnya para dosen jurusan Ekonomi Pembangunan dan seluruh staf akademik FE UII.
4. Papaku, Thamrin dan mamaku, Ida terimakasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, kepercayaan, kesabaran, bimbingan dan do'anya yang tulus yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Hanya ini yang bisa penulis berikan berikan saat ini untuk membahagiakan papa dan mama.
5. Kakakku, Chandra dan adik-adikku, Deki dan dita yang kusayangi, makasih banget atas kasih sayang, perhatian, kesabaran dan dukungan kalian.
6. Bang Yoyok, untuk “ketulusan” kasih sayang, cinta, kesabaran, dukungan dan perhatiannya.
7. Nina, untuk bantuannya terima kasih atas bantuannya.
8. My Best Friend tercinta, Risa (Teman curhatku yang selalu setia mendengarkan keluh kesahku), Ita (Teman suka dukaku yang selalu mengerti aku), Citra ( Terus bersemangat menjalani hidup jangan pernah putus asa jalani hidup dengna senyuman ), Kak Nurul (Hari-hari bersamamu selalu dengan senyuman), Dini (makasih atas bantuannya ya)
9. Teman-teman kosku yang imut-imut (Risa, Dini, Nita, Nisa, Ema, Bak Lora) makasih buat hari-hari yang penuh keceriaan, serta kebersamaan kita selama ini. Sukses buat kalian semua.
10. Linda, makasih atas hari-harinya dan pengertiannya.
11. Combro, Yuli, Ucer, Hari-hari bersama kalian penuh kebahagiaan.

12. Reni, Lala, Ulan , Teman-teman seperjuanganku walaupun kita jauh tapi hati kita selalu dekat.
13. Dui, Makasih da nemenin aku saat sendiri.
14. Yogyakarta yang telah memberikan banyak ceria dan kenangan.



Yogyakarta, April 2006

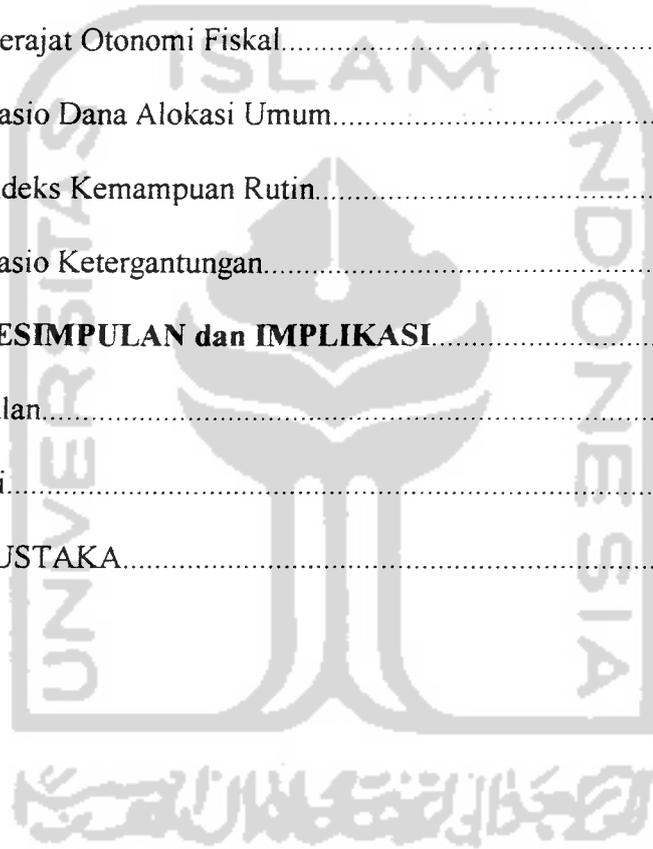
(Emelia Berti)

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
1.6 Sitematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>14</b>

2.1 Keadaan Geografis Kabupaten Lampung Timur.....	14
2.2 Keadaan Penduduk Kabupaten Lampung Timur.....	15
2.3 Mata Pencaharian.....	17
2.4 Keadaan Perekonomian Kabupaten Lampung Timur.....	18
<b>BAB III KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
3.1 Penelitian oleh Cahyo W.Darmawan.....	24
3.2 Penelitian oleh Sjafrizal.....	24
3.3 Penelitian oleh Mudjarad Kuncoro.....	26
3.4 Penelitian oleh Siti Aminah.....	27
<b>BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>30</b>
4.1 Teori Pembangunan.....	30
4.2 Pemerintahan Daerah.....	34
4.3 Otonomi Daerah.....	37
4.3.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	37
4.3.2 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	40
4.3.3 Keberhasilan Otonomi Daerah.....	41
4.4 Keuangan Daerah.....	44
4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	47
4.6 Pendapatan Asli Daerah.....	49
4.7 Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah.....	51
<b>BAB V MEODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
5.1 Jenis Sumber Data.....	54
5.2 Metodologi Pengumpulan Data.....	56

5.3 Analisis Data.....	56
<b>BAB VI ANALISIS DATA .....</b>	<b>61</b>
6.1 Hasil Perolehan Data.....	62
6.2 Rasio Keuangan Daerah.....	62
6.2.1 Tingkat Pertumbuhan PAD dan TPD.....	63
6.2.2 Derajat Otonomi Fiskal.....	66
6.2.3 Rasio Dana Alokasi Umum.....	68
6.2.4 Indeks Kemampuan Rutin.....	70
6.2.5 Rasio Ketergantungan.....	71
<b>BAB VII KESIMPULAN dan IMPLIKASI.....</b>	<b>75</b>
7.1 Kesimpulan.....	75
7.2 Implikasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Dirinci Menurut Kcamatan Tahun 2000-2004.....	17
2.2 Pertumbuhan PBRB Kabupaen Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	19
2.3 Pertumbuhan PDRB PER Kapita Kabupaen Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	21
6.1 Hasil Perolehan Data Peneliiian ( Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	62
6.2 Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	63
6.3 Tingkat Pertumbuhan TPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	65
6.4 Tingkat Pertumbuhan DOF Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	67
6.5 Tingkat Pertumbuhan RDAU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	69
6.6 Tingkat Pertumbuhan IKR Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	70
6.7 Tingkat Pertumbuhan Rasio ketergantungan.....	72
6.8 Rekapitulasi Pertumbuhan.....	73

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
6.2 Pertumbuhan PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	63
6.3 Pertumbuhan TPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	65
6.4 Pertumbuhan DOF Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	67
6.5 Pertumbuhan RDAU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	69
6.6 Pertumbuhan IKR Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	71
6.7 Pertumbuhan Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004.....	72



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana yang tersirat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat pemerintah daerah dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administratif. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil makmur baik materil maupun spiritual.

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, terutama kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan

penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin besar, sehingga tanggung jawab yang diemban juga akan bertambah banyak. Darumurti dan Rauta (2000: 49) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya, karena semakin bertambah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana daerah.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, meningkatnya pendapatan perkapita dan taraf hidup masyarakat, merupakan faktor-faktor yang menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah yang semakin tinggi. Di lain pihak sumber penerimaan yang terbatas harus diusahakan untuk menutupi kebutuhan tersebut.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998: 124). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai

seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Insukindro dkk. (1994: 1) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 dan 35 tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur

kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 1995: 8).

Dengan adanya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi yang luas ialah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004, yaitu :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan sebagainya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Dengan perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang tersebut, dampak yang akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah ialah bukan hanya sekedar menyangkut suatu perubahan sistem dan struktur pemerintah daerah. Akan tetapi juga menyangkut tentang kesiapan dan ketersediaan sumber

daya manusia aparatur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya daerah yang kuat, efektif dan efisien, serta memiliki akuntabilitas.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami berbagai kendala sebagai berikut (Arifin, 2000: 83-84) :

1. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga akan menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menetapkan peluang pajak baru.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Khusus untuk penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, kendala yang dihadapi daerah adalah belum adanya mekanisme

dan prosedur baku dalam penyaluran dana, sehingga seringkali terjadi keterlambatan.

Setiap daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang relatif hampir sama dalam kaitanya dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan suatu daerah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari 3 aspek ketersediaan prasarana dan sarana, pembiayaan dan personalia yang memadai menurut Mardiasmo (2000:1) yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membantu tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Daerah Tingkat II Lampung Tengah dibagian Timur, maka dibentuk wilayah kerja Pembantu yaitu Lampung Timur, Pada tahun 1999 dengan undang-undang nomor 12 tahun 1999, wilayah Pembantu Bupati Kabupaten Lampung Tengah wilayah Sukadana dibentuk menjadi Kabupaten Lampung Timur, alasan dipilihnya Lampung Timur karna Lampung Timur membentang pada posisi:  $105^{\circ} 15' - 106^{\circ} 20'$  Bujur Timur,  $4^{\circ} 37' - 5^{\circ} 37'$  Secara umum, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah  $5.325,03 \text{ Km}^2$  atau sekitar 15 % dari total Wilayah Propinsi Lampung dan hingga kini berdasarkan keputusan Bupati Lampung Timur no.19 tahun 2000 dan no.6 tahun 2002 maka jumlah desa dikabupaten Lampung Timur sebanyak 232 desa definitif dan 3 desa persiapan.

Adapun menjadi masalah pokok dalam penelitian ini bahwa untuk menjadi suatu daerah otonom yang sesungguhnya maka salah satu unsur penting yaitu diperlukan adanya sumber keuangan yang cukup oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap realita kondisi keuangan daerah pada kabupaten Lampung timur baik secara Internal maupun eksternal termasuk bagaimana proyeksi penerimaan daerah pada masa lima tahun yang akan datang dari tinjauan kebelakang realisasi keuangan daerah selama ini menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan maka penelitian dilakukan untuk menganalisis kemampuan kabupaten Lampung Timur menjadi daerah otonom dalam konsep kemampuan desentralisasi otonomi daerah, dibatasi pada aspek keuangan yang meliputi struktur dan pengesahan dalam menghitung rasio keuangan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah (TPD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak, Belanja Rutin, Bantuan-bantuan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di sisi lain, sangat disadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi penerimaan yang berbeda, karena adanya perbedaan potensi sumber daya, tingkat ekonomi dan karakteristik sosial budaya. Perbedaan seperti ini menjadikan hasil penelitian yang dilakukan di daerah tertentu sulit untuk menjelaskan persoalan yang sama di daerah lain. Dengan demikian, khusus untuk Lampung Timur perlu dilakukan penelitian tersendiri untuk mendapatkan gambaran yang relatif lebih lengkap mengenai kemampuan daerah menjadi daerah otonom.

Pada saat krisis ekonomi secara secara makro, dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa menjadi melambung tinggi. Daya

beli masyarakat relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi negatif. Tetapi kondisi ini berjalan membaik dengan pertumbuhan yang positif sejak tahun 1999 dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha untuk mengetahui lebih jauh mengenai seberapa besar kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk itu penulis menuangkannya dalam skripsi dengan judul : “ **MENGUKUR TINGKAT KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 di Kabupaten Lampung Timur**”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000-2004?

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Definisi dari otonomi daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 butir (h), yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Parameter keuangan daerah yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. DOF (Derajat Otonomi Fiskal)

DOF adalah Besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.

b. RDAU (Rasio Dana Alokasi Umum)

RDAU adalah Tingkat penyaluran dana yang harus di alokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah.

c. Indek Kemampuan Rutin (IKR)

IKR adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin.

d. Rasio Ketergantungan

Rasio adalah Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

Rumus perhitungan untuk parameter-parameter di atas berdasarkan pada Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Departemen Dalam Negeri tahun 1991.

Penelitian ini menggunakan data-data keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 1998 sampai dengan 2002 yang diambil dari arsip Pemerintah Daerah maupun Biro Pusat Statistik.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode 2000-2004.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat mendalami kajian dan wawasan tentang keuangan daerah khususnya tentang kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah yang ditinjau dari peranan dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta efisiensi dan efektivitas pengelolaannya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan kesiapan dalam melaksanakan otonomi daerah melalui peningkatan PAD.

### 3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi untuk menambah wacana bagi instansi terkait dan pihak-pihak lain guna penelitian lebih lanjut.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

##### BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### BAB II: TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subyek penelitian.

##### BAB III: KAJIAN PUSTAKA

Berisi pengkajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

##### BAB IV: LANDASAN TEORI dan HIPOTESIS

Berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta hipotesis dari rumusan masalah.

##### BAB V: METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

##### BAB VI: ANALISIS DATA

Berisi hasil analisa data yang diperoleh dalam penelitian.

## BAB VII: KESIMPULAN dan IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

#### **2.1. Keadaan Geografis Kabupaten Lampung Timur**

Secara umum, luas wilayah Kabupaten Lampung Timur adalah 5.325,03 Km<sup>2</sup> atau sekitar 15 % dari total Wilayah Propinsi Lampung, Wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak di tengah-tengah Propinsi Lampung, dan berada di 105° 15° - 106° 20° Bujur Timur, 4° 37° - 5° 37° Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Timur berbatasan sebelah Utara berbatasan dengan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa Propinsi Banten dan DKI Jakarta, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanjung Bintang dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Meto Raya. Secara administratif Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 232 kelurahan yang termasuk dalam 23 kecamatan.

Kabupaten Lampung Timur terletak di dataran Aluvial yang memiliki ketinggian berkisar antara 25 meter sampai 75 meter dari permukaan laut, dan dengan kemiringan 0 % sampai dengan 3 %. Jenis tanah sebagian besar adalah regosol, yaitu tanah merah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Lampung Timur di bawah garis Khatulistiwa 5 Lintang Selatan beriklim Tropis dengan angin laut yang bertiup dari samudera Indonesia dengan arah angin setiap tahunnya. Pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter

temperatur udara rata-rata berkisar antara  $24^{\circ}\text{C}$  –  $34^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata kelembaban udara sekitar 80 % - 88 % dan ternyata akan lebih tinggi pada tempat yang lebih tinggi.

## **2.2. Keadaan Penduduk Kabupaten Lampung Timur**

Jumlah Penduduk Lampung Timur berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1971 : 997.349 jiwa, Sensus Penduduk tahun 1980 : 1.690.947 jiwa dan hasil Sensus Penduduk tahun 1990 : 1.901.630 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 5,97 % per tahun pada periode tahun 1971–1980 menurun menjadi 1,18 % per tahun pada Periode tahun 1980-1990. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung pada periode tahun 1971-1980 adalah sebesar 5,77 % per tahun, dan rata-rata laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 1980-1990 juga menurun menjadi sebesar 2,67 % per tahun.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1971-1980, baik di Kabupaten Lampung Timur maupun Propinsi Lampung pertumbuhannya masih cukup tinggi. Bahkan untuk Lampung Timur yang mencapai 5,97 %, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Propinsi Lampung yang mencapai 5,77 %. Kondisi ini terjadi karena pada periode tersebut, Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi dan Lampung Timur merupakan daerah yang cukup diminati oleh para transmigran. Dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah Daerah Lampung berupa tertutupnya Daerah Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi, di samping adanya gerakan KB, maka rata-rata pertumbuhan penduduk Lampung pada periode tahun 1980-1990 dapat ditekan menjadi 2,67 % pertahun bahkan untuk Lampung Timur menjadi lebih kecil lagi, yaitu 1,18 % per

tahun dan berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir tahun 2000 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Timur tercatat 0,85 %.

Besarnya Sex Ratio atau perbandingan jumlah penduduk Laki-laki dan perempuan pada periode tahun 1971-1980 di Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 106, menurun menjadi 105 pada periode tahun 1980-1990, sedangkan pada periode 1990-2000 yang terakhir berdasarkan sensus penduduk tahun 2004 tercatat Sex Ratio di Kabupaten Lampung Timur adalah 108,93.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 adalah sebesar 869.428 jiwa terdiri dari 405.584 jiwa penduduk laki-laki, dan 418.844 jiwa penduduk perempuan dengan Sex Ratio sebesar 107,58, sedangkan menurut hasil sementara sensus penduduk tahun 2001 yang dilaksanakan pada bulan Juni 2001 oleh BPS tercatat jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur sebesar 874.169 jiwa yang terdiri dari 452.770 laki-laki dan 421.399 perempuan. Dan pada tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah 909.389 jiwa, terdiri dari 474.123 jiwa laki-laki dan 435.266 jiwa perempuan dengan Sex Ratio sebesar 107. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

**Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur Dirinci Menurut  
Kecamatan Tahun 2004**

No	Kecamatan	Luas Daerah ( km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk ( jiwa )	Kepadatan Penduduk ( jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Metro Kibang	7.677,93	18.579	242
2.	Batang Hari	14,887,93	50.198	337
3.	Sekampung	14,834,39	56.545	381
4.	Marga Tiga	25.072,94	43.256	173
5.	Sekampung Udik	33.912,45	65.179	192
6.	Jabung	44.516,88	70.880	159
7.	Psir Putih	19.393,83	33.714	160
8.	Wawai Karya	21.107,32	35.256	182
9.	Labuhan Maringai	19.498,73	62.726	322
10.	Mataram Baru	7.956,11	25.947	330
11.	Bandar Sribahono	18.570,67	41.373	297
12.	Melinting	13.929,94	24.963	314
13.	Gunung Pelindung	7.892,74	21.106	114
14.	Wai Jepara	22.926,92	48.103	210
15.	Braja Salebah	24.760,68	20.909	84
16.	Labuhan Ratu	48.551,22	38.915	80
17.	Sukadana	75,675,50	61.969	82
18.	Bumi Agung	7.317,47	16.460	225
19.	Batang Hari Nuban	18.068,84	30.827	220
20.	Pekalongan	10.012,81	41.621	416
21.	Raman utara	16.136,91	34.193	212
22.	Purbo Linggo	22.203,37	37.398	168
23.	Wai punggur	37.638,19	20.619	55
<b>Jumlah 2004</b>		<b>532.503</b>	<b>909.389</b>	<b>4.956</b>

Sumber : Kabupaten Lampung Timur dalam angka 2004, BPS, diolah

### 2.3. Mata Pencaharian

Sebagian penduduk di Kabupaten Lampung Timur merupakan penduduk angkatan kerja yang terdiri atas 474.125 jiwa tenaga kerja dengan 88,38% pegawai daerah dan 22,50 % pegawai kantor pusat. Sedangkan jumlah pencari kerja sebanyak 5.282 jiwa yang terdiri atas sarjana 715%, lulusan SMU 5.282 %, dan lulusan SMP 5.282 jiwa.

dan Diploma sebanyak 7,15%. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Lampung Timur mempunyai mata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan wiraswasta. Jenis usaha yang dijalankan penduduk di Kabupaten Lampung Timur umumnya bergerak dalam bidang jasa, perhotelan, restoran, dan usaha kecil dan menengah lainnya.

Kegiatan dalam sektor pertanian mencakup segala pengusaha dan pemanfaatan benda atau makhluk biologis (hidup) yang didapat dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usah bercocok tanam, pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan. Sektor pertanian ini meliputi beberapa sub sektor, yaitu: tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

#### **2.4. Keadaan Perekonomian Kabupaten Lampung Timur**

PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor Ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Tinggi rendahnya angka PDRB sangat ditentukan oleh besarnya nilai tambah dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.2

**Pertumbuhan PDRB****Kabupaten Lampung Timur Menurut Harga Berlaku Tahun 2000-2004**

Tahun	Harga Berlaku			
	Dengan minyak	Tingkat pertumbuhan(%)	Tanpa minyak	Tingkat pertumbuhan(%)
2000	2747,55	12,34	2417,01	0,03
2001	3229,98	17,55	2860,03	18,32
2002	3978,04	23,16	3194,89	11,70
2003	4666,25	17,30	3805,35	19,10
2004	5293,13	14,43	4138,48	8,75

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.3

**Pertumbuhan PDRB****Kabupaten Lampung Timur Menurut Harga Konstan Tahun 2000-2004**

Tahun	Harga Konstan			
	Dengan minyak	Tingkat pertumbuhan(%)	Tanpa minyak	Tingkat pertumbuhan(%)
2000	2747,55	4,5	2417,01	3,9
2001	2874,08	4,6	2509,04	3,8
2002	3359,59	16,89	2602,33	3,7
2003	3557,00	5,8	2724,15	4,7
2004	3528,73	-0,79	2833,72	4,0

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sejak terbentuknya Kabupaten Lampung Timur tahun 1999 hingga tahun 2004, terlihat pada table 2.2 dan 2.3 pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir menurut harga berlaku dengan minyak tahun 2004 perkembangan PDRB harga berlaku menunjukkan kenaikan tetapi menurut harga konstan perkembangan PDRB dengan minyak pada tahun 2004 terjadi penurunan, berdasarkan harga berlaku PDRB dengan minyak pada tahun 2000 sebesar 12,34% naik menjadi 13,43% pada tahun 2004.

Berdasarkan harga konstan PDRB tanpa minyak pada tahun 2000 sebesar 3,9% meningkat sebesar 4,0% pada tahun 2004, PDRB dengan minyak tahun 2000-2004 mengalami penurunan karna terdapat pertumbuhan minus yaitu pada tahun 2004 sebesar -0,7% Kondisi ini disebabkan adanya krisis ekonomi secara makro contohnya kenaikan BBM, dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa menjadi melambung tinggi. Daya beli masyarakat menjadi rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi negatif.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan beragam keputusan yang dibuat oleh kalangan dunia usaha untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi telah dapat membuahkan hasil berupa peningkatan PDRB. Walaupun demikian masih memerlukan penanganan lebih lanjut agar membawa kemajuan bagi perekonomian Kabupaten Lampung Timur dengan lebih cepat dan terarah. Dampak krisis yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 ternyata sampai saat ini belum pulih sepenuhnya, terbukti dengan laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tiga tahun terakhir belum mencapai angka yang ideal atau masih di bawah 5 % pertahun.

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan PDRB Per Kapita menurut Harga Berlaku**  
**Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004**

Tahun	Harga Berlaku			
	Dengan minyak	Tingkat Pertumbuhan(%)	Tanpa minyak	Tingkat Pertumbuhan(%)
2000	2892553	9.5	2540363	9.5
2001	3106902	7.4	3015330	18.69
2002	4143270	33.32	3311435	8.9
2003	4836085	16.12	3915296	18.3
2004	5514571	14.03	4290847	9.5

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

**Tabel 2.5**  
**Pertumbuhan PDRB Per Kapita menurut Harga Konstan**  
**Kabupaten Lampung Timur Tahun 2000-2004**

Tahun	Harga Konstan			
	Dengan minyak	Tingkat Pertumbuhan (%)	Tanpa minyak	Tingkat Pertumbuhan(%)
2000	3053532	2.6	2681339	1.9
2001	3182725	4,2	2772475	3.3
2002	3511266	10.32	2802879	1.1
2003	3649021	3.9	2776859	3.8
2004	3614298	0.9%	2885617	3.9

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Selama kurun waktu 2000-2004, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita dengan minyak bumi atas harga

berlaku tahun 2000 mencapai 9,5% dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 14,03%. Sedangkan PDRB tanpa minyak menurut harga berlaku tahun 2000 sampai 2004 tidak terdapat perubahan yaitu 9,6%.

PDRB perkapita atas harga konstan selama tahun 2000-2004 tanpa minyak terus meningkat jika pada tahun 2000 PDRB per kapita sebesar 1,9% pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 3,9%, PDRB per kapita dengan minyak mengalami penurunan jika pada tahun 2000-2003 mengalami peningkatan sebesar 10,32% akan tetapi pada tahun 2002-2004 mengalami penurunan karena ada angka minus yaitu -0,9% mengalami penurunan itu disebabkan karena produktifitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh kabupaten Lampung Timur sebagian dimiliki oleh penduduk berdomisili diluar daerah, sehingga PDRB perkapita belum sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat.

PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur secara ringkas baik harga berlaku maupun harga konstan tidak menggambarkan peningkatan pendapatan penduduk tidak terlalu tinggi, namun indikator ekonomi ini antara lain dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi oleh pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Kabupaten Lampung Timur secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi dengan angka yang positif, meskipun belum selesai dengan harapan masyarakat. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur menampakkan keadaan yang cukup bervariasi. PDRB terbentuk dari kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Seiring perjalanan waktu, perubahan dan

perkembangan ekonomi terus terjadi sehingga distribusi atau penyebaran PDRB ke dalam sektor-sektor selalu mengalami perubahan.

Sumbangan terbesar untuk PBRB atas dasar harga berlaku tahun 2004 adalah keuangan, persewaan, jasa perusahaan sebesar 7.18% diikuti sektor industri sebesar 5.99%, sektor perdagangan hotel dan restoran yaitu sebesar 5.49% dan sektor jasa sebesar 5,41%.



### **BAB III**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

##### **3.1. Cahyo W. Darman (2000)**

Dalam penelitiannya, Cahyo W. Darman mengambil judul Upaya Mengurangi Ketimpangan Fiskal Antar Daerah, dan penulis ingin mengkaji tentang keterbatasan sumber daya ekonomi. Potensi yang dimiliki oleh suatu daerah serta upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi *gap* yang terlalu besar antar daerah dalam wacana *grand strategy*, yaitu upaya untuk mengangkat kembali perekonomian Indonesia melalui penetapan sektor unggulan yang dapat menjadi *lead sector* bagi sektor-sektor lain.

Menurut Cahyo B. Darman faktor pertanian dan industri pengolahan serta pertambangan dan galian merupakan sektor yang besar sekali dalam memberikan pengaruh terhadap PDRB di tiap daerah. Salah satu ciri strategis pembangunan yang harus dimiliki oleh negara yang mempunyai potensi besar di sektor pertanian adalah kebijakan pembangunan yang menjaga keterkaitan antar sektor pertanian dengan sektor industri. Kaitan yang paling sesuai adalah pengolahan produk-produk sektor pertanian ke dalam pengembangan agroindustri.

##### **3.2. Sjafrizal (2000)**

Dalam penelitiannya, Sjafrizal mengambil judul Analisis Tinjauan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman. Peneliti ingin mengkaji sejauh mana pengaruh PAD terhadap

pengeluaran daerah tingkat II selama ini dan menyongsong pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001.

Dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa pajak daerah memberi sumbangan yang cukup besar terhadap PAD dibanding sumber pendapatan daerah dari retribusi yang selalu berfluktuasi. Bila dilihat dari peningkatan PAD memang cukup menggembirakan, tetapi PAD ini masih selalu lebih kecil dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Hal ini berarti daerah Sleman selama ini masih sangat tergantung dari subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat.

Masih besarnya tingkat ketergantungan fiskal di kabupaten Sleman menunjukkan belum mandiri sumber keuangan pemerintah daerah. Sebenarnya pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan, yang terpenting adalah wewenang. Sebagaimana dikemukakan oleh Devas, cukup tidaknya penerimaan daerah tergantung dari sumbangan PAD terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Apabila besarnya penerimaan daerah 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka daerah dianggap telah memiliki penerimaan yang cukup memadai. Sebaliknya bila lebih kecil dari 20 %, maka daerah belum memiliki penerimaan yang cukup.

Sumbangan PAD terhadap APBD mengalami kenaikan sejak tahun anggaran 1987/88 dan mencapai puncaknya pada tahun 1990/91 sebesar 32,2 %. Akan tetapi, rasio menurun drastis dari 20,09 % pada tahun 1992/93. Melihat angka ini, Kabupaten Sleman belum memiliki wewenang secara konstan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa proyek otonomi daerah tingkat II di

Kabupaten Sleman belum sesuai dengan harapan dari otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah.

Dalam kesimpulannya peneliti menyatakan dalam jangka pendek, tingkat ketergantungan fiskal memang tidak memberikan dampak yang berarti bagi pembangunan daerah akan tetapi dalam jangka panjang ketergantungan yang selalu meningkat, Hal ini menyebabkan tingkat kemandirian daerah perlu dipertanyakan sehingga dapat dikatakan bahwa proyek percontohan otonomi daerah di Kabupaten Sleman dapat dikatakan gagal mencapai sasarannya, paling tidak dilihat dari wewenangnya.

### **3.3. Mudrajad Kuncoro (1995)**

Mudrajad Kuncoro (Prisma) dengan judul Desentralisasi Fiskal Di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan, melihat bahwa meskipun UU No.5 /1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan baik dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pembangunan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah, terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang di drop dari pusat. Kendati titik berat otonomi daerah difokuskan pada Dati II, namun kenyataan justru Dati II-lah yang paling tergantung pada sumbangan atau bantuan pemerintah pusat, tepatnya 17 % Dati II

atau 59,25 % dari total Dati II di Indonesia, memiliki angka prosentase PAD terhadap total belanja daerah kurang dari 15 %. Dengan kata lain ini menunjukkan betapa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber daerahnya sendiri.

Menurut Mudrajad Kuncoro ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat. *Pertama*, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. *Kedua*, adalah tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Penyebab *ketiga* adalah kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bias diandalkan sebagai sumber penerimaan. Faktor penyebab ketergantungan fiskal yang *keempat* bersifat politis, sehingga dikhawatirkan apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor *kelima* penyebab ketergantungan tersebut adalah “kelemahan” dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena itu solusi yang ditawarkan adalah: (1) meningkatkan peran BUMD; (2) meningkatkan penerimaan daerah; (3) mengubah pola pemberian subsidi; dan (4) meningkatkan pinjaman daerah.

#### **3.4. Siti Aminah (2002)**

Dalam penelitiannya, Siti Aminah mengambil judul kemampuan keuangan daerah Sekayu Kabupaten Sumatra Selatan dalam mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 1998-2002. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan keuangan daerah yang diukur terdiri dari PAD, TPD, DOF,

RDAU, IKR dan Rasio Ketergantungan. Sistem pemerintahan Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi dan proses pembantuan sehingga terdapat pemerintah daerah dan daerah otonom atau wilayah bersifat administratif, hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik material maupun spritual.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara keseluruhan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho :1998:124 ) kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah menggali sumber – sumber keuangan sendiri ( Kaho: 1998 : 124)

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan dalam kaitanya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu di pandang sebagai salah satu indikator kriteria untuk mengukur suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar subangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin ketergantungan daerah kepada pusat sehingga konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Disisi lain sangat disadari bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang penerimaan yang berbeda, karena adanya perbedaan potensi sumber daya, tingkat ekonomi dan karakteristik sosial budaya, perbedaan seperti ini menjadikan hasil penelitian yang dilakukan di daerah tertentu sulit untuk daerah Sekayu Kabupaten Sumatra Selatan perlu dilakukan penelitian tersendiri untuk

mendapatkan gambaran yang relatif lebih lengkap mengenai kemampuan daerah menjadi daerah otonom.

Pada saat krisis ekonomi secara makro, dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa menjadi melambung tinggi. Daya beli masyarakat relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi negatif. Tetapi kondisi ini berjalan membaik dengan pertumbuhan yang positif sejak tahun 1999 dan seterusnya .

Pada tahun 2002, daerah Sekayu Kabupaten Sumatra Selatan secara agregat mengalami pertumbuhan ekonomi dalam angka yang positif, meskipun belum selesai dengan harapan masyarakat. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi di daerah Sekayu Kabupaten Sumatra Selatan menampilkan keadaan yang cukup bervariasi. PDRB terbentuk dari kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Seiring perubahan dan perkembangan ekonomi terus terjadi sehingga distribusi atau penyebaran PDRB ke dalam sektor-sektor selalu mengalami perubahan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN TEORI**

#### **4.1. Teori Pembangunan**

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata yang ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas, seperti dimensi sosial yang justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, pembangunan juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.

Model pertumbuhan lancar telah mendominasi perkembangan teori pembangunan yang dikemukakan Adam Smith, Karl Marx dan Rostow. Dasar pemikiran dari model ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahap-tahap tertentu. Tahapan tersebut merupakan proses urutan, artinya mutlak harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun, satu-persatu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi (Kuncoro, 1997).

#### **1. Teori Adam Smith**

Adam Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap, yaitu masa perburuan, masa berternak, masa bercocoktanam, perdagangan, dan tahap perindustrian. Menurut teori ini :

- a. tahap perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari masyarakat bagi wilayah administrasi.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan tradisional ke masyarakat modern yang cenderung kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja atau masyarakat sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi.

## **2. Teori Karl Marx**

Karl Marx di dalam bukunya *Das Kapital* membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme yang akan sejalan dengan pelaksanaan proses pembangunan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam tahap ini tuan tanah merupakan pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar relatif tinggi terhadap pelaku ekonomi lain. Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula agraris-feodal kemudian mulai beralih menjadi masyarakat industri yang kapitalis. Selanjutnya, ekonomi kapitalis

menyebabkan masyarakat bawah tertindas yang akan menimbulkan paham sosialisme.

### **3. Teori Rostow**

Pada dekade 1950-1960, teori Rostow mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori ini berdasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Dengan mengamati proses pembangunan di Eropa dari mulai abad pertengahan sampai dengan abad modern, kemudian Rostow memformulasikan pola pembangunan menjadi tahapan evolusi dari suatu pembangunan ekonomi. Rostow membagi proses pembangunan ekonomi menjadi lima tahap, yaitu (1) Tahap ekonomi tradisional, (2) Tahap prakondisi tinggal landas, (3) Tahap tinggal landas, (4) Tahap menuju kedewasaan, (5) Tahap konsumsi masa tinggi.

#### **1. Perekonomian Tradisional**

Perekonomian masyarakat tradisional cenderung bersifat sub sistem dengan pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan mentah lainnya. Struktur sosial kemasyarakatan dalam sistem masyarakat seperti ini bersifat berjenjang. Kemampuan penguasaan sumber daya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga.

## 2. Prakondisi Tinggal landas

Tahap kedua dari proses pertumbuhan ini merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang disamping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya.

## 3. Tinggal Landas

Tinggal landas merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan proses pembangunan bagi kehidupan bermasyarakat. Pengalaman negara Eropa menunjukkan bahwa tahap ini berlaku dalam waktu yang relatif pendek yang diperkirakan dua dasawarsa. Dalam tahap ini akan terjadi suatu revolusi industri yang berhubungan erat dengan revolusi metode produksi.

## 4. Tahap Kedewasaan

Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan secara swadaya. Tahapan ini ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu (1) Tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik; (2) Perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan; (3)

Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

#### 5. Tahap Konsumsi Masa Tinggi

Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi secara besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya kereta api merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada fase ini terjadi perubahan orientasi dari pendekatan penawaran (*supply side*) menuju ke pendekatan permintaan (*demand side*) dalam system produksi yang dianut.

### 4.2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan teori Rostow di atas, pada saat ini negara Indonesia termasuk dalam tahap tinggal landas. Untuk mencapai tahapan selanjutnya, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

#### 1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah guna pelaksanaan asas desentralisasi menjadi wewenang

dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan dan perangkat.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Dalam asas dekonsentrasi, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepada daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat. Kebijakan atas pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

## 3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban memberikan laporan dari hasil pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Untuk menetapkan bidang yang menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dapat diterapkan sistem pembagian antara lain (Kaho, 2001: 15):

### 1. Sistem Residu

Secara umum tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

### 2. Sistem Material

Tugas-tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif atau terinci, dan di luar dari tugas yang telah ditentukan merupakan urusan pemerintah pusat.

### 3. Sistem Formal

Urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan di dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya. Tetapi tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

### 4. Sistem Otonomi Riil

Penyerahan urusan, tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

### 5. Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan-urusan kepada daerah dilakukan secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

### 4.3 Otonomi Daerah

#### 4.3.1. Arti Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan sendiri (Pamudji, 1982: 45).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (1991: 17), terdapat empat unsur otonomi daerah, yaitu:

1. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai daerah;

2. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah;
3. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah;
4. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (di luar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Untuk pemerintah Propinsi hanya diberikan otonomi terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota. Selain itu, kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya (Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU No. 32 Tahun 2004).

Hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Ini berguna untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat mencapainya, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah kabupaten dan daerah kota dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten atau kota langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Utomo (2000), seluruh khasanah politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai

otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal yang harus menitik beratkan adanya kewenangan. Dengan kewenangan yang dimiliki, akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat ditolak bahwa penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah diperlukan adanya keuangan yang cukup memadai. Hal ini dapat terjadi suatu polemik “apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang atau sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan”.

Kewenangan menjadi *central issues* dalam pelaksanaan otonomi karena untuk mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada kedaulatan rakyat. Di samping itu, untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama beberapa tahun yang lalu, kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, sehingga tidaklah mengherankan apabila di era reformasi sering terjadi adanya euphoria yang berlebihan ataupun juga *defence mechanism* yang terlalu ketat padahal kewenangan belum secara nyata dilimpahkan.

Pada prinsipnya, hakekat otonomi daerah ialah mempunyai sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas otonomi, serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada tiga faktor yang menentukan, yaitu perangkat, personalia, dan pembiayaan atau pendanaan daerah.

#### 4.3.2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut:

- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat, akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

#### **4.3.3. Keberhasilan Otonomi Daerah**

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut:

1. Kemampuan struktural organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

3. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

#### 4. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. *Pertama*, manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. *Kedua*, keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. *Ketiga*, peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. *Keempat*, untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan

yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995: 23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk

mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, Mamesah (1995 : 34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

#### **4.4. Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

#### **4.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Anggaran tersebut menggambarkan rincian kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan dalam rupiah untuk suatu periode tertentu dan merupakan penjabaran dari GBHN dan Repelita. Tallo (1997 :28) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sering disebut anggaran

daerah, ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom tersebut meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dengan masing-masing ada sisi pendapatan dan sisi belanja.

Pemahaman sistem dan mekanisme yang dianut oleh APBN adalah sama bagi APBD, dalam konteks perencanaan pembangunan dipahami hakikatnya merupakan bentuk operasional rencana kegiatan tahunan. APBN merupakan penjabaran Repelita di tingkat nasional dan APBD sebagai penjabaran Repelitada di tingkat daerah.

Anggaran tersebut menggambarkan secara terperinci jumlah biaya kebutuhan yang seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, disebut sistem anggaran berimbang (*balance budget*) yang dinamis. Anggaran berimbang yang dinamis memberikan makna bahwa jumlah biaya yang dianggarkan pada sisi penerimaan diupayakan harus seimbang dengan jumlah pada sisi pengeluaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan anggaran jika terjadi ketidaksesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam struktur APBD, komponen penerimaan daerah terdiri dari :

1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan atau Instansi yang lebih tinggi
4. Bagian-pinjaman pemerintah daerah

#### 4.6. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998: 68). PAD dapat memberikan warna tersendiri terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. menurut Pasal 79 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
  - a. Hasil pajak dan retribusi daerah
  - b. Hasil perusahaan milik daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah
  - d. Dana perimbangan
2. Pinjaman daerah
3. Pendapatan daerah lain-lain yang sah

Pada Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan untuk daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam rangka lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merata di seluruh daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, maka di dalam bidang keuangan daerah ada lima kebijaksanaan pokok (Nota Keuangan dan RAPBN 1996/ 1997), yaitu:

1. Kebijakan untuk meningkatkan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada

pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pemerintah daerah dapat makin mampu mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2. Kebijakan di bidang pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas lapangan kerja, mendorong usaha-usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pengusaha lemah, serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.
4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.
5. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan sektor swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.

#### **4.7. Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah**

Derajat otonomi fiskal daerah akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD-nya, seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dalam pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat

independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD, seperti pajak, retribusi dan lain sebagainya (Radianto, 1997:3).

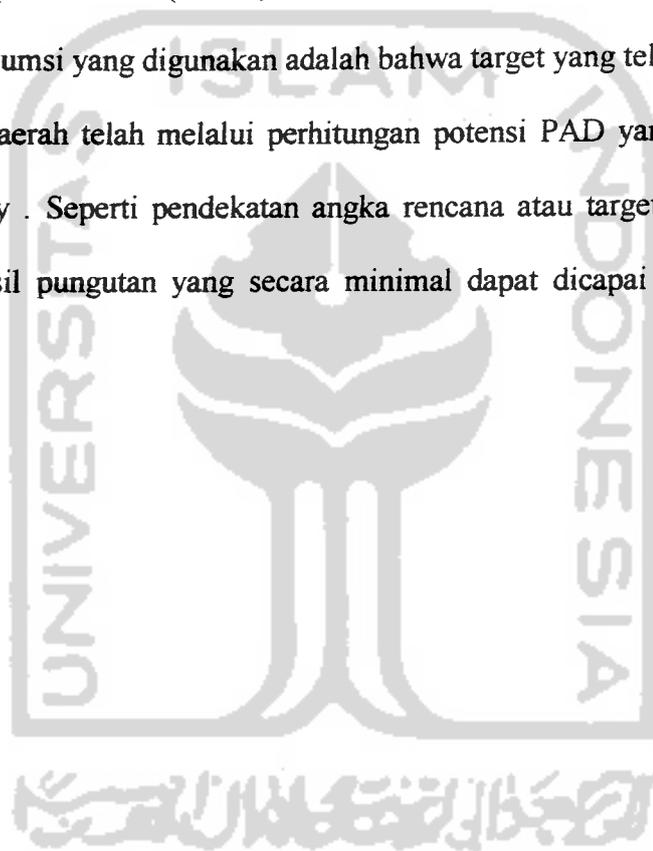
Devas, dkk (1989: 17) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu kerja dengan usaha yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin tinggi hasil perbandingan antara *output* dan *input*-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Atau disebut juga daya guna, yaitu mengukut bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak bersangkutan. Selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor atau instansi lain dalam pemungutan pajak.

Menurut Osborne dan Gaebler (1997: 389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu *output* tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja.

Dikaitkan dengan upaya mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah, efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan potensinya berdasarkan anggapan bahwa semua wajib pajak atau retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak atau retribusi yang

menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang.

Hasil guna menyangkut semua tahapan administrasi penerimaan pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan pembukuan penerimaan (Devas, dkk, 1989: 144). Untuk dapat menghitung efektivitas, asumsi yang digunakan adalah bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah melalui perhitungan potensi PAD yang disebut dengan target diproxy . Seperti pendekatan angka rencana atau target yang merupakan perkiraan hasil pungutan yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran.



## **BAB V**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **5.1 Jenis dan sumber data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut runtut waktu (time series) dalam bentuk tahunan dari tahun 1998-2002. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Besarnya PAD pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2000-2005
2. Besarnya PDRB pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2000-2004 Besarnya bantuan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2000-2004

Dalam penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bapeda Lampung Timur berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur periode tahun anggaran 2000-sampai dengan 2004.
2. Biro Pusat Statistik tahun 2004 berupa data-data mengenai keadaan umum daerah Kabupaten Lampung Timur

Dalam penelitian ini, data-data Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2000-2004 yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu realisasi penerimaan asli daerah antara lain hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Total Penerimaan Daerah (TPD), yaitu seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan, bantuan, penerimaan lain-lain dan pinjaman daerah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan alokasi atau transfer dana dari pusat kepada daerah otonom dalam bentuk blok yang diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintahan daerah.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu membiayai berbagai macam kebutuhan khusus daerah dan menanggulangi keadaan yang mendesak.
5. Bagi Hasil Pajak, meliputi PBB/PKB/BBNKB, dan Bagi Hasil Bukan Pajak antara pemerintah pusat dan daerah.
6. Belanja Rutin yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.
7. Bantuan dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang dialokasikan untuk beberapa kebutuhan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa anggaran, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, pinjaman, serta penerimaan pembangunan. Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan.

## 5.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta buku-buku tentang keuangan daerah dan otonomi daerah

### 2. Studi Lapangan

#### a. Observasi

Mengadakan tinjauan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder dari Bapeda Lampung Timur dan BPS 2004

#### b. Dokumentasi

Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder.

## 5.3 Analisis Data

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis rasio keuangan daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah Lampung Timur di dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
2. Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar bagi operasionalisasi variabel yang di ukur sebagaimana akan dikemukakan dalam penelitian ini.

3. Menghitung dan menyajikan hasil analisis data yang berupa rasio-rasio keuangan daerah
4. Menarik kesimpulan atas rangkaian analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga diketahui bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, yang dilakukaukan adalah :

1. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990: 30)

$$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

TP PAD<sub>t</sub> = tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD<sub>t</sub> = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PAD<sub>t-1</sub> = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

2. Mengukur tingkat pertumbuhan Total Penerimaan Daerah (TPD)

Untuk menghitung Total Penerimaan Daerah dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990:30)

$$TP\ TPD_t = \frac{TPD_t - TPD_{t-1}}{TPD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

TP TPD<sub>t</sub> = tingkat pertumbuhan Total Penerimaan Daerah

TPD<sub>t</sub> = Total Penerimaan Daerah Tahun Berjalan

TPDt-1 = Total Penerimaan Daerah tahun sebelumnya

3. Mengukur Derajat otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Lampung Timur (Depdagri,1991)

$$DOF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun t

4. Mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD Kabupaten Lampung Timur (Depdagri, 1991)

$$RDAU = \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

Keterangan:

RDAU = Rasio Dana Alokasi Umum

DAU = Dana Alokasi Umum

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

5. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Lampung Timur untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan (Depdagri, 1991)

$$IKR = \frac{PADt + DAU + BagiHasil}{BelanjaRutin} \times 100\%$$

**Keterangan:**

Bagi hasil berasal dari bagi hasil bukan pajak. Bagi hasil ini bersumber dari: bagi hasil minyak bumi yang bersumber di Lampung Timur, dimana pemerintah propinsi Lampung memperoleh 30% Lampung Timur sebagai penghasil 15% dan 9 kabupaten lainnya 55%. Sehingga Lampung timur memperoleh 6% bagi hasil.

6. Menghitung Rasio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991)

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{DAU + DAK + Bantuan}{APBD} \times 100 \%$$

**Keterangan :**

Untuk Dana bantuan dari Pusat, Lampung Timur membutuhkan dikarenakan

Adanya pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah seperti:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dimana anggaran belum tersedia.
- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup.

Langkah pengambilan keputusan hipotesis penelitian dilakukan dengan menetapkan kategori sebagai berikut (Depdagri, 1991: 20) :

Perubahan (%)	PAD / TPD / DOF / IKR	RDAU / RK
< 10,00	Sangat kurang	Sangat baik
10,01 - 20,00	Kurang	Baik
20,01 - 30,00	Cukup	Sedang
30,01 - 40,00	Sedang	Cukup
40,01 - 40,00	Baik	Kurang
> 50,01	Sangat baik	Sangat kurang



## **BAB VI**

### **ANALISIS DATA**

#### **6.1 Hasil Perolehan Data**

Dalam penelitian ini, data-data Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2000-2004 yang dipergunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Total Penerimaan Daerah (TPD)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Bagi Hasil Pajak digunakan dalam mengukur rasio keuangan daerah seperti tersebut di atas, maka selanjutnya peneliti mengamati dan mempelajari data-data keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2000-2004. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencatat data-data yang diperlukan guna analisis data penelitian.
6. Belanja Rutin
7. Bantuan-bantuan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Setelah menetapkan variabel-variabel secara keseluruhan, hasil perolehan data yang berasal dari proses observasi dan dokumentasi secara terperinci dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini:

**Tabel 6.1**  
**DATA KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**TAHUN 2000 – 2004**

KETARANGAN	2000	2001	2002	2003	2004
PAD	1.543.292.599	2.903.890.000	3.466.500.000	5.822.500.000	10.000.000.000
TPD	37.043.864.689	231.406.551.823	303.084.134.580	382.910.957.583	751.983.457.583
BAGI HASIL	5.784.429.283	219.726.599.667	296.201.746.490	352.313.457.583	728.483.457.383
DAU	54.191.329.300	168.987.983.000	209.703.000.000	241.020.000.000	257.030.000.000
DAK	28.621.653.307	158.987.983.000	208.730.011.000	250.720.000.000	12.460.000.000
BANTUAN	29.716.142.807	8.776.062.256	3.416.888.091	21.805.301.432	24.775.000.000
APBD	101.642.088.783	217.612.383.588	276.568.758.041	362.250.478.038	382.943.919.583
BELANJA RUTIN	60.312.401.273	144.595.564.613	212.831.102.742	241.831.378.187	371.333.160.865

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Lampung Timur*

## 6.2 Rasio Keuangan Daerah

Hasil perolehan data tersebut di atas digunakan untuk menghitung rasio keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2000-2004 untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

### 6.2.1 Tingkat Pertumbuhan PAD dan TPD

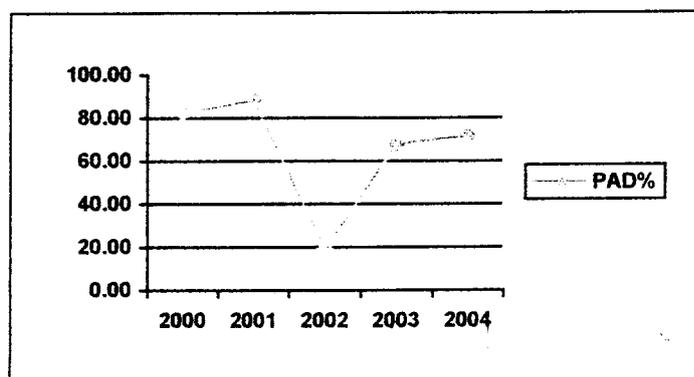
Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur untuk memperoleh gambaran kondisi keuangan daerah dari pertumbuhan nilai PAD melalui metode rata-rata. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.2**  
**Tingkat Pertumbuhan PAD**  
**Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**

Tahun	PAD (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori PAD	Perubahan Pertumbuhan
2000	82,50	>50,1	Sangat Baik	5,6
2001	88,16	>50,1	Sangat Baik	(68,79)
2002	19,37	10,01-20,0	Kurang	48,59
2003	67,96	>50,1	Sangat Baik	3,78
2004	71,74	>50,1	Sangat Baik	
Total	329,73			
Rata-rata	65,95			

**Grafik 6.2**  
**Pertumbuhan PAD**

**Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**



Berdasarkan tabel 6.2 di atas memperhatikan bahwa PAD Kabupaten Lampung Timur mengalami kecenderungan meningkat pada tahun 2000-2004 sangat baik yaitu PAD menggambarkan kondisi keuangan yang berkembang sangat pesat Pada Tahun 2001 sebesar 82,50% akan tetapi terjadi penurunan pada tahun 2002 sebesar 19,37% Hal ini disebabkan krisis ekonomi berkepanjangan yang disebabkan kondisi keuangan perekonomian Indonesia yang kurang baik yang menyebabkan krisis ekonomi secara makro, dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga barang dan jasa melambung tinggi yang akhirnya pendapatan daerah berkurang. Namun pada tahun 2003-2004 perlahan-lahan kondisi membaik PAD meningkat sebesar 71,74%, Dampak kondisi tersebut bagi Pemda Lampung Timur telah berhasil mengumpulkan dana penerimaan daerah dari berbagai usaha guna keperluan daerah Lampung Timur dalam membiayai kegiatannya, yang terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hingga tahun 2004 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun relatif tinggi sebesar 65,95%.

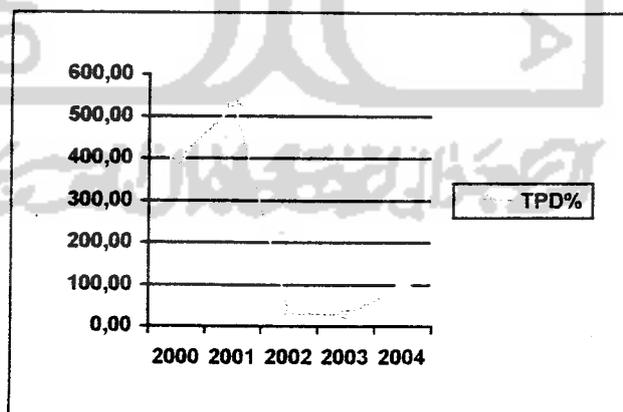
Keterangan tabel 6.2 adalah:

- Sangat Baik, karena PAD membuat kondisi keuangan daerah berkembang pesat.
- Kurang, PAD mengalami penurunan yang sangat cepat pada tahun 2000

**Tabel 6.3**  
**Tingkat Pertumbuhan TPD**  
**Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 – 2004**

Tahun	TPD (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori TPD	Perubahan Pertumbuhan
2000	399,49	>50,01	Sangat Baik	
2001	524,68	>50,01	Sangat Baik	125,19
2002	30,97	30,01-40,01	Sedang	289,31
2003	26,34	20,01-30,01	Cukup	4,63
2004	96,38	>50,01	Sangat Baik	70,04
Total	1077,82			
Rata-rata	215,56			

**Grafik 6.3**  
**Pertumbuhan TPD**  
**Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**



Berdasarkan pada tabel 6.3 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah Kabupaten Lampung Timur sudah mengalami peningkatan yang pesat terutama tahun 2001 pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 399,49%. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun

2002 dilihat dengan adanya penurunan yang sangat drastis pada tahun 2002 sebesar 30,97%, pada tahun 2004 perlahan terjadi kenaikan sebesar 96,38%. Penurunan dan kenaikan yang tidak merata tiap tahunnya dikarenakan adanya krisis ekonomi secara makro dimana tingkat inflasi menjadi tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung tinggi. Daya beli masyarakat relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi menjadi tidak seimbang hingga tahun 2004 keadaan belum pulih sepenuhnya yang mengakibatkan Total Penerimaan Daerah (TPD) yaitu seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan, bantuan, penerimaan lain-lain dan pinjaman daerah menjadi menurun karena krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Secara keseluruhan Kabupaten Lampung Timur telah mampu menambah penerimaan daerah dengan rata-rata 215,56% pertahun.

Keterangan tabel 6.3 adalah:

- Sangat Baik, karena TPD membuat realisasi berkembang pesat.
- Cukup, karena TPD berjalan tidak terlalu cepat namun tidak terlalu rendah juga.

### **6.2.2 Derajat Otonomi Fiskal**

Kesiapan dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari segi positif fiskal keuangan daerah di dalam memberikan andil sisi penerimaan APBD. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung rasio PAD terhadap TPD pada tahun berjalan. Untuk

menggambarkan tentang DOF Kabupaten Lampung Timur diketahui kecenderungan perubahan PAD terhadap TPD. Dalam hal ini DOF akan menggambarkan besar kemampuan kabupaten Lampung Timur memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.

Tabel 6.4

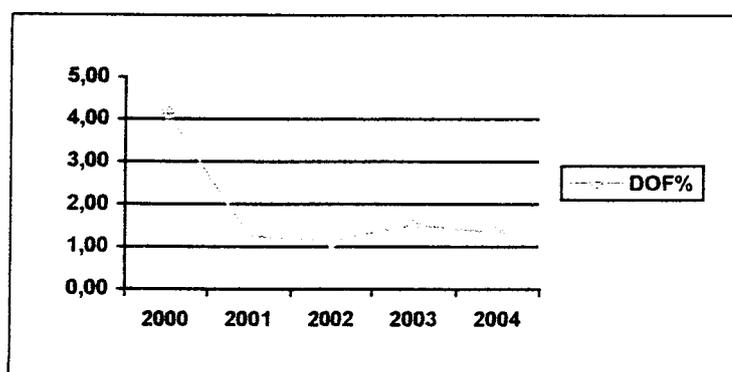
**Tingkat Pertumbuhan DOF**  
**Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 – 2004**

Tahun	Pertumbuhan DOF (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori DOF	Perubahan Pertumbuhan
2000	4,17	<10,01	Sangat Kurang	2,92
2001	1,25	<10,01	Sangat Kurang	0,11
2002	1,14	<10,01	Sangat Kurang	0,38
2003	1,52	<10,01	Sangat Kurang	0,19
2004	1,33	<10,01	Sangat Kurang	
Total	9,42			
Rata-rata	1,88			

Grafik 6.4

**Pertumbuhan DOF**

**Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**



Hasil perhitungan pada tabel 6.4 diatas menunjukkan pertumbuhan DOF pada tahun 2000 mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,17% akan tetapi pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 1,25% hingga tahun 2004 hal itu terjadi karena peranan PAD sangat kecil, sementara TPD terus mengalami kenaikan untuk mengimbangi belanja daerah., dampak bagi Lampung Timur jika di lihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki DOF dengan rata-rata 1,88% pertahun yang berarti Lampung Timur mampu mengendalikan keuangan nya daerahnya sendiri.

Keterangan :

- Sangat Kurang : Karena DOF berjalan sangat kurang

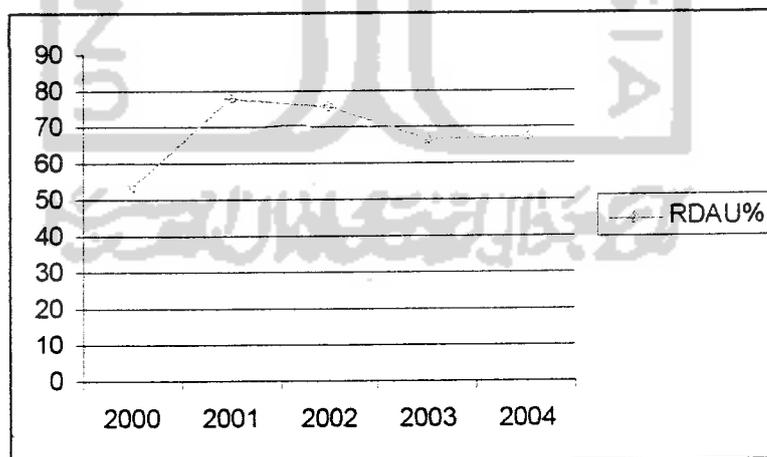
### 6.2.3 Rasio Dana Alokasi Umum

Tingkat penyaluran dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada kabupaten Lampung Timur menunjukkan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urutan pemerintah.

**Tabel 6.5**  
**Tingkat Pertumbuhan RDAU**  
**Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 – 2004**

Tahun	RDAU (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori RDAU	Perubahan Pertumbuhan
2000	53,33	>50,01	Sangat Kurang	24,32
2001	77,65	>50,01	Sangat Kurang	1,82
2002	75,83	>50,01	Sangat Kurang	9,3
2003	66,11	>50,01	Sangat Kurang	0,58
2004	67,11	>50,01	Sangat Kurang	
Total Rata-rata	340,42 68,08			

**Grafik 6.5**  
**Pertumbuhan RDAU**  
**Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**



Pada Tabel 6.5 menunjukkan Lampung Timur telah berhasil mengalokasikan atau transfer dana dari pusat kepada daerah otonom dalam bentuk blok yang diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar pemerintahan itu terbukti RDAU pada tahun 2000: 55,33% hingga tahun 2004 meningkat sebesar

67,11%. Jika dilihat secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kabupaten Lampung Timur telah mampu mengurangi penyaluran dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 68,08% pertahun.

Keterangan :

- Sangat Kurang : Sangat baik, yang berarti pertumbuhan RDAU membuat tingkat penyaluran dana semakin berkurang.

#### 6.2.4 Indek Kemampuan Rutin

Untuk mengetahui keuangan daerah dapat menggunakan tolak ukur indeks kemampuan rutin (IKR) yaitu suatu ukuran menggambarkan sejauh mana kemampuan dalam potensi daerah kabupaten Lampung Timur dalam membiayai belanja rutin.

Tabel 6.6

#### Tingkat pertumbuhan IKR

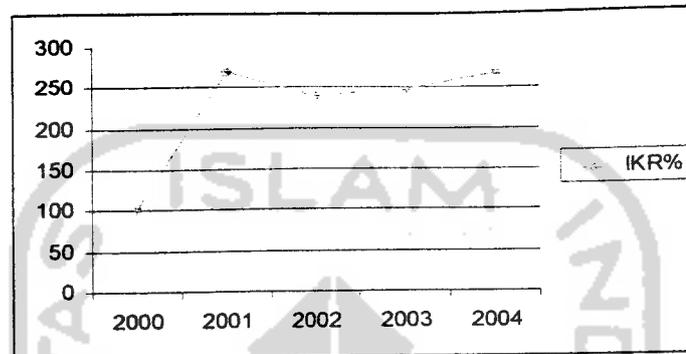
Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 – 2004

Tahun	IKR (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori IKR	Perubahan Pertumbuhan
2000	102,16	>50,01	Sangat Baik	168,68
2001	270,84	>50,01	Sangat Baik	31,5
2002	239,34	>50,01	Sangat Baik	(8,42)
2003	247,76	>50,01	Sangat Baik	20,33
2004	268,09	>50,01	Sangat Baik	
Total	1128,19			
Rata-rata	225,63			

Grafik 6.6

## Tingkat Pertumbuhan IKR

## Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004



Berdasarkan table 6.6 di atas memperhatikan bahwa nilai IKR Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan pada tahun 2000-2004, yaitu pada tahun 2000 IKR berjumlah 102,16% mencapai 268,09% pada tahun 2004, apabila secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Lampung Timur mampu menambah indeks Kemampuan rutin dengan rata-rata sebesar 226,63% pertahunnya.

Keterangan :

- Sangat Baik : Karena IKR membuat kemampuan dan potensi daerah dalam membiayai belanja rutin berkembang pesat.

### 6.2.5 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dan bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber daya dan potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

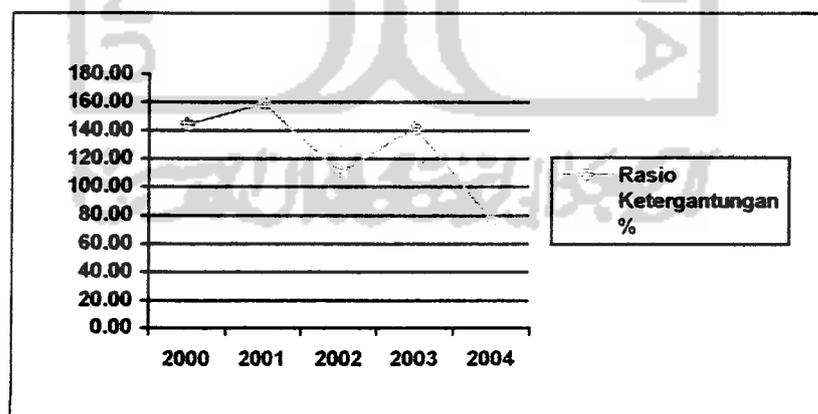
Tabel 6.7

**Tingkat pertumbuhan Rasio Ketergantungan  
Kabupaten Lampung Timur tahun 2000 – 2004**

Tahun	RK (%)	Kategori Perubahan(%)	Kategori RK	Perubahan Pertumbuhan
2000	144,62	>50,01	Sangat Kurang	14,74
2001	159,34	>50,01	Sangat Kurang	49,34
2002	110,59	>50,01	Sangat Kurang	31,77
2003	141,77	>50,01	Sangat Kurang	64,95
2004	76,82	>50,01	Sangat Kurang	
Total Rata-rata	632,53 126,51			

Grafik 6.7

**Tingkat Pertumbuhan Rasio Ketergantungan  
Kabupaten Lampung Timur 2000 – 2004**



Dari hasil analisis pada table 6.7 tersebut menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2000 sebesar 144,6% hingga tahun 2003 semakin meningkat sebesar 141,77% akan tetapi tahun 2004

mengalami penurunan sebesar 76,82%, walaupun dengan nilai rata-rata sebesar 126,51% pertahunnya. Namun demikian jika melihat kecendrungan diatas, maka Pemerintah Daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sudah dapat mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Keterangan :

- Sangat Kurang : Sangat Baik, karena rasio ketergantungan semakin menurun.

**Tabel 6.8**  
**Rekapitulasi Pertumbuhan**  
**( PAD, TPD, DOF, RDAU, IKR, RK )**

Tahun	PAD	TPD	DOF	RDAU	IKR	RK
2000	82,50	399,49	4,17	53,33	102,16	144,62
2001	88,16	524,68	1,25	77,65	270,84	159,34
2002	19,37	30,97	1,14	75,83	239,34	110,59
2003	67,96	26,34	1,52	66,11	247,76	141,77
2004	71,74	96,38	1,33	67,11	268,09	76,82
Total	329,73	1077,82	9,42	340,42	1128,19	638,53
Rata2	65,95	215,56	1,88	68,08	225,63	126,51

Keterangan :

- PAD :Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2000-2004 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun 65,95%, kondisi ini membuat Lampung Timur telah berhasil meningkatkan perekonomian yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil laba usaha daerah dan lain-lain hasil daerah

Lampung Timur yang sah dan Pemerintah Lampung Timur Tidak tergantung Lagi pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi.

- TPD :Total Penerimaan Daerah (TPD) tahun 2000-2004 berjalan tidak terlalu cepat namun tidak terlalu rendah juga, secara keseluruhan total penerimaan daerah seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, Bagi Hasil Pajak , Sumbangan menjadi menurun karena krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan, secara keseluruhan Kabupaten Lampung Timur telah mampu menambah penerimaan daerah dengan rata-rata 215,56% pertahunnya.
- DOF :Pertumbuhan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) tahun 2000-2004 menggambarkan kondisi keuangan yang sangat baik bagi kondisi keuangan daerah dengan rata-rata pertahun 1,88% yang berarti Lampung Timur mampu mengendalikan keuangan daerahnya sendiri.
- RDAU :Pertumbuhan Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) tahun 2000-2004 menggambarkan kondisi keuangan yang sangat baik bagi kondisi keuangan dengan rata-rata pertahunnya 68,08%.
- IKR :Pertumbuhan Indeks Kemampuan Rutin {IKR) tahun 2000-2004 telah mampu membiayai belanja rutin sebesar sebesar 222,63%.
- RK :Pertumbuhan Rasio Ketergantungan (RK) 2000-2004 sebesar 126,51%, jadi Lampung Timur tidak tergantung lagi pada pemerintah pusat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zainal, "Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, Nyata dan Bertanggung Jawab", *Prisma*, Vol XII, No.3.
- Binder, Brian, B.J., 1984, *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII, No.2.13-25.
- Cahyo, W. Darmam (2000), *Upaya Mengurangi Ketimpangan Fiskal Antar Daerah*, Karya Tulis Ilmiah (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Darumurti, K.D., dan Rauta, Umbu, 2000, "Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini dan Esok", *Kritis*, Vol XII, No.3.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 1991, *Manual Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Insukiro, dkk, 1994, "Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah", Laporan Penelitian, FE-UGM, Yogyakarta.
- Jamil, Ahmad, Menggali Potensi Otonomi Daerah Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, UII, Yogyakarta.
- Kaho, Josep, 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Kuncoro, Muhadraj, 1995, "Desentralisasi Fiskal di Indonesia", *Prisma*, Vol. VII, No.4.

Otonomi daerah (Undang-Undang No. 32 dan Peraturan Pemerintah R.I. No.6 Tahun 2005) dan Pilkada, Penerbit Lima Bintang, Surabaya.

Fisipol UGM, 1991, "Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung jawab".  
*Laporan Akhir Penelitian , Litbang Depdagri, Jakarta.*

Mamesah, DJ., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Madiasmo, 2000,"Pradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Makalah Seminar, HIMMEP UGM, Desember, Yogyakarta.*

Mudjarad Kuncoro, Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan , Prisma, april 2005.

Pamuji,S., 1982, Pembinaan Perkotaan di Indonesia : *Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan* , Penerbit Iktiar Baru, Jakarta.

Siti, Aminah (2002), *Kemampuan Keuangan Daerah Sekayu Kabupaten Sumara Selatan dalam Mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Uniersias Islam Indonesia, Yogyakarta.

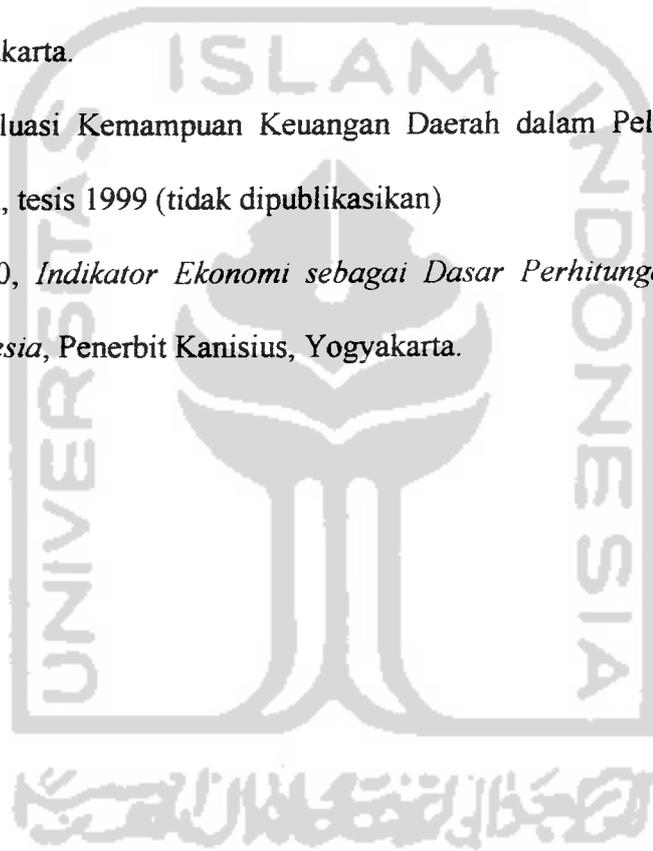
Syafrizal (2000), *Analisis Tinjauan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah di Kabupaten Sleman*, Skripsi Sarjana (idak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Uniersitas Islam, Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu, 1986, *Pokok-Pokok Kebijakan , Perencanaan, Pemrograman ,dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Utomo, Warsito, 2000, "Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Dalam Implikasi Otonomi," *Makalah*, Magister Ekonomi Pembangunan UGM, Yogyakarta.

Winarni, Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi daerah, tesis 1999 (tidak dipublikasikan)

Widodo, 1990, *Indikator Ekonomi sebagai Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.



# LAMPIRAN



### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mengukur tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Lampung Timur :

$$\text{TPPADT} = \frac{\text{PADt} - \text{PADt} - 1}{\text{PADt} - 1} \times 100\%$$

keterangan :

Tp PADt : Tingkat pertumbuhan pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt : Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt - 1 : Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

Tahun 2000	: $\frac{1.543.292.599 - 845.620.000}{845.620.000}$	: 82,50%
Tahun 2001	: $\frac{2.903.000.000 - 1.543.292.599}{1.543.292.599} \times 100\%$	: 88,16%
Tahun 2002	: $\frac{3.466.500.000 - 2.903.890.000}{2.903.890.000} \times 100\%$	: 19,37%
Tahun 2003	: $\frac{5.822.500.000 - 3.466.500.000}{3.466.500.000} \times 100\%$	: 67,96%
Tahun 2004	: $\frac{10.000.000 - 5.822.500.000}{35.822.500.000} \times 100\%$	: 71,74%

### Total Penerimaan (TPD)

Mengukur tingkat pertumbuhan total penerimaan daerah (TPD) untuk memperoleh gambaran keuangan di kabupaten Lampung Timur :

$$TPTPD_t = \frac{TPD_t - TPD_{t-1}}{TPD_{t-1}} \times 100\%$$

keterangan :

TPTPD<sub>t</sub> : Tingkat pertumbuhan APBD tahun berjalan

TPD<sub>t</sub> : Total Penerimaan Daerah Tahun t Berjalan

TPD<sub>t-1</sub> : Total Penerimaan Daerah Tahun t Sebelumnya

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2000} &: \frac{37.043.864.689 - 7.416.210.881}{7.416.210.881} \times 100\% \\ &: 399,49\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &: \frac{231.406.551.823 - 37.043.864.689}{37.043.864.689} \times 100\% \\ &: 542,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &: \frac{303.084.134.580 - 231.406.551.823}{231.406.551.823} \times 100\% \\ &: 30,97\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &: \frac{382.910.957.583 - 303.084.134.580}{303.084.134.580} \times 100\% \\ &: 26,34\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &: \frac{751.983.457.583 - 382.910.957.583}{382.910.957.583} \times 100\% \\ &: 96,38\% \end{aligned}$$

### Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) di Kabupaten Lampung Timur

$$DOF = \frac{PDA_t}{TPD_t} \times 100\%$$

keterangan :

DOF : Derajat Otonomi Fiskal  
 PAp<sub>t</sub> : Total pendapatan Asli Daerah tahun t  
 TPD<sub>t</sub> : Total penerimaan daerah tahun t

$$\text{Tahun 2000} : \frac{1.54.292.599}{37.043.864.689} \times 100\% \\ : 4.17\%$$

$$\text{Tahun 2001} : \frac{2.903.890.000}{231.406.551.823} \times 100\% \\ : 1.25\%$$

$$\text{Tahun 2002} : \frac{3.466.500.000}{303.084.134.580} \times 100\% \\ : 1.14\%$$

$$\text{Tahun 2003} : \frac{5.822.500.000}{382.910.957.583} \times 100\% \\ : 1.83\%$$

$$\text{Tahun 2004} : \frac{10.000.000.000}{751.983.457.583} \times 100\% \\ : 1.33\%$$

### Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU)

Mengukur besarnya Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD

Kabupaten Lampung Timur :

$$RDAU : \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

keterangan :

RDAU : Rasio Dana Alokasi Umum

DAU : Dana Alokasi Umum

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2000} &: \frac{54.191.329.300}{101.596.905.697} \times 100\% \\ &: 53,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &: \frac{168.987.983.000}{217.612.383.588} \times 100\% \\ &: 77,65\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &: \frac{209.730.000.000}{276.568.758.041} \times 100\% \\ &: 75,83\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &: \frac{241.020.000.000}{362.250.478.038} \times 100\% \\ &: 66,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &: \frac{257.030.000.000}{382.943.919.583} \times 100\% \\ &: 67,11\% \end{aligned}$$

### Indeks Kemampuann Rutin (IKR)

Menghitung indeks kemampuan rutin (IKR) di Kabupaten Lampung Timur untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan.

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PADt : Pendapatan Asli Daerah Tahun Berjalan

DAU : Dana Alokasi Umum

$$IKR = \frac{PADt + DAU + Bagi Hasil}{Belanja Rutin} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2000} &: \frac{1.378.224.941 + 54.191.329.300 + 6.043.925.856}{60.312.401.273} \times 100\% \\ &: 102,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2001} &: \frac{2.903.890.000 + 168.987.983.000 + 219.726.599.662}{144.595.564.613} \times 100\% \\ &: 270,84\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2002} &: \frac{3.466.500.000 + 209.730.000.000 + 296.201.796.490}{212.831.102.742} \times 100\% \\ &: 239,34\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2003} &: \frac{5.822.500.000 + 241.020.000.000 + 352.313.457.583}{241.831.378.187} \times 100\% \\ &: 247,76\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2004} &: \frac{10.000.000.000 + 257.030.000.000 + 728.483.457.583}{371.333.166.865} \times 100\% \\ &: 268,09\% \end{aligned}$$

### Rasio Ketergantungan

Menghitung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah :

Keterangan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{Bantuan} \times 100\%}{\text{APBD}} \times 100\%$$

keterangan :

DAU : Dana Alokasi Umum  
 DAK : Dana Alokasi Khusus  
 APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

$$\text{Tahun 2000} : \frac{54.191.329.300 + 63.864.839.900 + 28.821.653.307}{101.596.905.697} \times 100\%$$

: 144.6%

$$\text{Tahun 2001} : \frac{168.987.983.000 + 168.987.583.000 + 8.776.062.256}{217.612383.588} \times 100\%$$

: 159.34%

$$\text{Tahun 2002} : \frac{209.730.000.000 + 209.730.000.000 + 3.416.888.091}{276.568.758.041} \times 100\%$$

: 110.00%

$$\text{Tahun 2003} : \frac{241.020.000.000 + 250.720.000.000 + 21.805.301.423}{362.250.478.038} \times 100\%$$

: 141.77%

$$\text{Tahun 2004} : \frac{257.030.000.000 + 12.460.000.000 + 24.775.000.000}{382.943.919.583} \times 100\%$$

: 76.82%